

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Taosige Wau¹, Jhon Firman Fau²

Program Studi Manajemen STIE Nias Selatan
(taosnisel@gmail.com)
(jhontelda@gmail.com)

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan adalah dua instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Melalui penelitian ini akan dilakukan analisis pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan. Dengan menggunakan data time series, model penelitian ini diestimasi dengan metode OLS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan mampu mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan, dimana PAD menjadi variabel dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, diperlukan upaya dari Pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan PAD-nya sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Keyword: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 telah membawa angin segar bagi pembangunan ekonomi di daerah. Pasalnya, melalui kebijakan otonomi daerah setiap daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola ekonomi daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuannya adalah, selain untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah, melalui kebijakan otonomi daerah ini juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

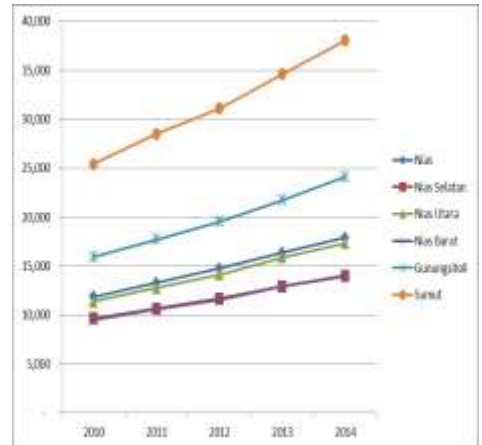
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dengan kata lain bahwa setiap daerah otonom dituntut untuk lebih mendorong pembangunan ekonomi di daerah dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kuncoro (2004) bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Jika pembangunan ekonomi daerah diukur menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, maka konsep pembangunan ekonomi daerah dalam hal ini tidak terlepas dari dukungan kemampuan keuangan daerah, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum maupun dalam bentuk Dana Perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Kedua sumber pendanaan ini sangat menentukan pergerakan ekonomi daerah.

Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu daerah otonom yang baru berdiri pada tahun 2003 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Meskipun sudah berumur 14 tahun hingga tahun 2016, Kabupaten Nias Selatan masih tergolong sebagai daerah Terbelakang, Tertinggal dan Terdepan (3T). Hal ini tergambarkan dari tingkat pendapatan Kabupaten Nias Selatan yang sangat jauh dari tingkat pendapatan Sumatera Utara sebagaimana yang tertera pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1
Pendapatan Perkapita Beberapa Daerah di Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2010-2014



Sumber: PDRB Kabupaten-Kota di Indonesia, BPS

Dari Gambar 1 di atas terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 9,64 Juta per tahun, lebih rendah dari pendapatan perkapita Kabupaten Nias Utara yang mencapai Rp 11,37 Juta per tahun dan Kabupaten Nias sebesar Rp 11,85 Juta. Tingkat pendapatan perkapita lima daerah kabupaten/kota yang ada di kepulauan Nias jauh lebih rendah dari tingkat pendapatan perkapita seluruh daerah provinsi Sumatera Utara yang sudah mencapai Rp 25,41 Juta. Kondisi seperti ini tidak mengalami perubahan yang berarti dari tahun ke tahun, bahkan

pertumbuhan pendapatan perkapita daerah-daerah di kepulauan Nias terlihat lebih lambat dari pertumbuhan pendapatan per kapita Sumatera Utara secara keseluruhan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan cukup rendah dari beberapa daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara bahkan daerah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Utara yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, factor apa yang menyebabkan rendahnya pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan? Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki andil pada pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan? Pertanyaan ini akan dijawab melalui penelitian ini. Dengan demikian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD

dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan.

Penulisan makalah ini dibagi dalam lima bagian. Setelah bagian pendahuluan ini akan dijelaskan beberapa tinjauan literatur yang menjadi landasan teori dilakukannya penelitian. Beberapa model pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan pada bagian ini, demikian juga dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ketiga akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan, sedangkan pada bagian empat akan dijelaskan temuan dalam penelitian ini. Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini akan menjadi bagian penutup makalah ini.

TINJAUAN LITERATUR

Model Pertumbuhan Neoklasik

Solow

Menurut Todaro (2009) bahwa peran kemajuan teknologi

menjadi faktor residu dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam bentuk yang formal, penjelasan standar model pertumbuhan Neoklasik Solow menggunakan fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha} \quad (1)$$

dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah persediaan modal (yang mencakup modal manusia dan modal fisik), L adalah tenaga kerja dan A adalah mewakili produktivitas tenaga kerja yang tingkat pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Menurut Solow bahwa jika tidak ada perubahan teknologi dalam kegiatan perekonomian maka hal ini akan berimplikasi pada pencapaian tingkat output dan modal jangka panjang yang di sebut *steady-state equilibrium*.

Model Pertumbuhan Harrod-

Domar

Menurut Todaro (1995) setiap perekonomian pada dasarnya

harus senantiasa mencadangkan atau menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat dan bahan baku) yang telah susut atau rusak. Namun untuk memacu pertumbuhan ekonomi di butuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*). Asumsikan bahwa ada hubungan ekonomi langsung antara besarnya total stok modal atau K , dengan total GNP atau Y . Maka kita dapat menyusun sebuah model pertumbuhan ekonomi yang sederhana sebagai berikut.

Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau s dari pendapatan nasional (Y). Oleh karena itu hubungan tersebut dapat ditulis dalam bentuk persamaan yang sederhana:

$$S = sY \quad (2)$$

Investasi neto (I) didefenisikan sebagai perubahan dari stok modal

(K) yang dapat diwakili oleh ΔK , sehingga kita dapat menuliskan persamaan sederhana yang kedua sebagai berikut:

$$I = \Delta K \quad (3)$$

Akan tetapi, karena jumlah stock modal, K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output, Y seperti telah di tunjukkan oleh rasio modal-output, k , maka:

$$\frac{K}{Y} = k \quad (4)$$

Atau $\frac{\Delta K}{\Delta Y} = k$, sehingga $\Delta K = k\Delta Y$.

Mengingat tabungan nasional neto (S) harus sama dengan investasi neto (I) maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut:

$$S = I \quad (5)$$

Dari persamaan (2) telah di ketahui bahwa $S = sY$ dan dari persamaan (3) dan persamaan (4) kita juga telah mengetahui bahwa:

$$S = sY = k\Delta Y = \Delta K = I \quad (6)$$

Atau bisa di ringkas menjadi:

$$sY = k\Delta Y \quad (7)$$

Selanjutnya, apabila kedua sisi persamaan (7) dibagi dengan Y dan kemudian dengan k maka didapat:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \quad (8)$$

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, secara jelas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GNP ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional S , serta rasio modal output nasional k . Secara lebih spesifik, persamaan itu menyatakan bahwa tanpa adanya intervensi pemerintah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara “positif” berbanding lurus dengan tabungan (yakni, semakin banyak bagian GNP yang ditabung dan diinvestasikan, maka akan lebih besar lagi pertumbuhan GNP yang dihasilkannya) dan secara “negatif” atau berbanding terbalik terhadap rasio modal-output dari suatu perekonomian (yakni, semakin besar rasio modal-output nasional atau k ,

maka tingkat pertumbuhan GNP akan semakin rendah.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sejak tahun 2001. Melalui kebijakan otonomi daerah ini sistem pemerintahan dari bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus pemerintahan dan mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing.

Implikasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada bidang keuangan dilaksanakan melalui prinsip desentralisasi fiskal

sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tujuannya adalah memberi dukungan dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui dukungan keuangan dalam bentuk Dana Perimbangan oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan itu, daerah juga diberikan kewenangan untuk menambah sumber pendapatan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota setiap tahunnya. Dana perimbangan yang berasal dari APBN adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah/hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Siahaan (2010) retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikaan oleh negara bagi penduduknya secara langsung. Jasa tersebut dapat di katakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa negara. Menurut Siahaan (2010) secara umum pajak adalah pungutan dari

masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung. Yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mampu memberikan jawaban atas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2016) yang menganalisis pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kota Manado. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DAU Kota Manado mampu mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan

ekonomi Kota Manado, sedangkan DAK dan PAD tidak.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati (2007). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari hasil analisisnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dewi (2013) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan model analisis jalur. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa secara langsung PAD berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Bali, sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui Penanaman Modal Asing (PMA). PAD memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menguji pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yaitu data PAD, Dana Perimbangan dan data PDRB Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2005-2016.

Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan dapat dimodelkan sebagai berikut:

$$G_t = \beta_0 + \beta_1 PAD_t + \beta_2 DP_t + \varepsilon$$

Dimana G adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010, PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan, DP adalah Dana Perimbangan Kabupaten Nias Selatan, β_0 adalah konstan, β_1 , β_2 adalah koefisien regresi, dan ε adalah residual.

Metode estimasi yang digunakan untuk mengestimasi model regresi pada persamaan (1) adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Pemilihan metode ini selain karena jenis data yang digunakan adalah data time series, dengan metode OLS ini maka model dapat diestimasi secara efektif.

Hasil estimasi model dengan metode OLS agar menjadi hasil estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) maka terlebih dahulu dilakukan pengujian model. Pengujian model yang dimaksud antara lain uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji

multikolinearitas. Sedangkan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan uji t-student, uji F, dan uji koefisien determinansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data

Data statistik yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tiga variabel, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan PDRB Kabupaten Nias Selatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel Dana Perimbangan (DP) dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Adapun data statistik tersebut adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
Nilai PDRB ADHK Tahun 2010,
PAD
dan Dana Perimbangan
Kabupaten Nias Selatan

Tahun 2006-2015 (Milliar Rupiah)

Tahun	PDRB	PAD	Dana Perimbangan
2006	2366	4,15	247,82
2007	2469	5,94	287,49
2008	2587	10,52	319,78
2009	2692	9,44	333,74
2010	2803	12,84	360,71
2011	2923	23,03	399,72
2012	3074	12,15	469,15
2013	3217	15,56	552,75
2014	3356	12,83	585,23
2015	3506	15,04	628,94

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2006 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun lambat. Jika pada tahun 2006 nilai PDRB ADHK Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar Rp 2,36 Triliun meningkat menjadi Rp 3,50 Triliun pada tahun 2015, atau dengan rata-rata sebesar Rp 2,89 Triliun per tahun.

Hal sama juga terjadi pada nilai Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Nias Selatan, yaitu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada 2006 nilai

Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 247,82 Milliar pada tahun 2015 nilai Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Nias Selatan menjadi Rp 628,94. Dengan kata lain bahwa Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan sebanyak 2,5 kali dalam kurun waktu 10 tahun. Peningkatan yang cukup signifikan ini tentu akan berdampak pada perekonomian daerah Kabupaten Nias Selatan.

Berbeda halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2006, nilai PAD Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 4,15 Milliar dan terus meningkat hingga tahun 2011 menjadi Rp 23,03 Milliar. Pada tahun 2012 nilai PAD Kabupaten Nias Selatan kemudian menurun menjadi Rp 12,15 Milliar, atau dengan rata-rata Rp 12 Milliar per tahun dari tahun 2006-2015. Nilai PAD Kabupaten Nias Selatan ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Selatan masih bergantung cukup tinggi dari pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Nias Selatan.

Pengujian Asumsi Klasik

Model penelitian yang telah dibangun pada bagian sebelumnya diestimasi menggunakan alat bantu perangkat lunak program SPSS. Hasil estimasi model sebelum dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi model untuk memastikan bahwa hasil estimasi model yang didapatkan merupakan hasil yang bersifat BLUE. Uji asumsi dimaksud adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil uji multikolinearitas sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2.
Nilai Statistik *Variance Inflation Factor* (VIF)
dan *Tolerance* Model Regresi

Variabel	Tolerance	VIF
PAD	0,695	1,440

Dana	0,695	1,440
Perimbangan		

Sumber: Diolah Sendiri

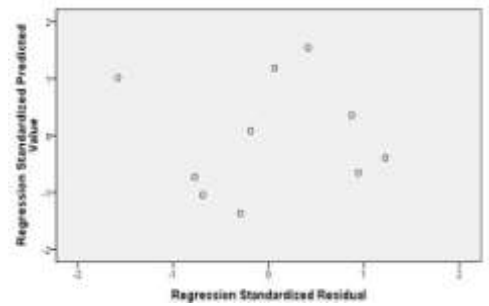
Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa nilai Tolerance untuk PAD dan Dana Perimbangan adalah sebesar 0,695, sedangkan nilai VIF untuk kedua variabel adalah sebesar 1,44. Karena nilai Tolerance mendekati nilai 1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka hasil pengujian multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat bentuk diagram pencar antara residual yang distandardisasi dan nilai yang diramalkan yang telah distandardisasi. Hasilnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 2 di bawah ini. Dari Gambar 2 di bawah terlihat bahwa diagram pencar antara residual yang distandardisasi dan nilai yang diprediksi yang distandardisasi terlihat acak dan tidak membentuk pola tertentu. Bentuk diagram pencar

seperti ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki residual yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terindikasi masalah heteroskedastisitas.

Pengujian model yang ketiga adalah uji autokorelasi. Alat uji yang digunakan pada uji autokorelasi ini adalah uji Durbin Watson. Dari hasil perhitungan, nilai statistik Durbin Watson (DW) diperoleh sebesar 2,157. Nilai statistik DW ini berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang tidak memiliki masalah autokorelasi.

Gambar 2.
Diagram Pencar Antara Residual
yang Distandardisasi
dan Nilai Prediksi yang
Distandardisasi



Sumber: Diolah Sendiri

Uji Hipotesis

Hasil pengujian model regresi di atas disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi menggunakan metode OLS memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya, untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya maka pada bagian ini akan dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis tersebut terdiri dari uji *t*, uji *F* dan uji koefisien determinasi.

a. Uji statistik *t*

Hasil perhitungan nilai statistik model dalam penelitian ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3.
Hasil Perhitungan Nilai Statistik *t*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.680,324	49,287		34,093	0,000
PAD	7,596	3,336	0,105	2,277	0,057
DP	2,692	0,133	0,933	20,311	0,000

Dependent Variable: PDRB

Sumber: Diolah Sendiri

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa nilai statistik t untuk variabel PAD adalah sebesar 2,277. Jika dibandingkan dengan nilai tabel t , maka nilai statistik t variabel PAD dikatakan signifikan pada tingkat α sebesar 10%. Sedangkan nilai statistik t untuk variabel Dana Perimbangan diperoleh lebih tinggi sebesar 20,311. Nilai statistik t variabel Dana Perimbangan ini signifikan pada tingkat α sebesar 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa variabel PAD dan variabel Dana Perimbangan yang digunakan dalam model pengaruhnya signifikan atau berarti.

b. Uji statistik F

Hasil perhitungan nilai statistik F dalam penelitian ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Nilai Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.314390,914	2	657.195,457	337,538	0,000
Residual	13.629,186	7	1.947,027		
Total	1.3280,020,100	9			

Sumber: Diolah Sendiri

Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa nilai statistik F sebesar 337,53. Sedangkan nilai tabel F pada tingkat α sebesar 1% dengan derajat kebebasan pembilang sebesar 2 dan derajat kebebasan penyebut sebesar 7

adalah 9,55. Karena nilai statistik F lebih besar dari nilai tabel F maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat α sebesar 1%.

c. Uji Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan nilai statistik koefisien determinasi sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5.
Hasil Perhitungan Nilai Statistik
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,995 ^a	0,990	0,987	44,12512

Sumber: Diolah Sendiri

Dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa nilai statistik koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,99. Nilai koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa variabel

bebas yang digunakan dalam model penelitian ini mampu menjelaskan perubahan nilai variabel terikat sebesar 99%. Sedangkan 1% lainnya dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak disebutkan dalam model. Ini artinya bahwa penggunaan variabel PAD dan Pada Perimbangan sebagai variabel penjelas PDRB adalah sangat tepat.

Pembahasan

Dari hasil pengujian asumsi yang digunakan dalam model penelitian ini menunjukkan bahwa model yang diestimasi dengan menggunakan metode OLS telah sudah terpenuhi. Demikian juga dengan hasil pengujian hipotesis, baik uji t, uji F, maupun uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam model baik secara individu maupun secara simultan adalah signifikan pada tingkat α 1-5%.

Bahkan model yang telah disusun dapat dikatakan merupakan model yang sangat tepat yang ditunjukkan oleh tingginya nilai koefisien determinasi yang dihasilkan. Dengan demikian, model penelitian ini dapat digunakan menjadi model peramalan yang tepat dan menjadi pokok pembahasan pada bagian ini.

Hasil estimasi model yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 3 di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 1.680,324. Nilai ini signifikan pada tingkat α sebesar 1%. Nilai koefisien ini berarti bahwa nilai rata-rata PDRB Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar Rp 1.680 Milliar apabila Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki nilai PAD dan Dana Perimbangan. Nilai ini sangat rendah apabila dilihat dari nilai rata-rata PDRB Kabupaten Nias Selatan yang sesungguhnya.

Selanjutnya, nilai koefisien variabel PAD adalah sebesar 7,596 dan signifikan pada tingkat α sebesar

10%. Nilai koefisien regresi variabel PAD ini berarti bahwa setiap peningkatan nilai PAD Kabupaten Nias Sesar Rp 1 Milliar akan mendorong peningkatan nilai PDRB sebesar Rp 7,59 Milliar. Dengan kata lain bahwa sumbangan peningkatan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan cukup besar.

Dari Tabel 3 di atas juga dapat diketahui nilai koefisien variabel Dana Perimbangan yaitu sebesar 2,692. Nilai koefisien ini signifikan pada tingkat α sebesar 1%. Besaran nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan ini adalah bahwa setiap peningkatan Dana Perimbangan dari Pemerintah sebesar Rp 1 Milliar akan mampu mendorong peningkatan PDRB Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 2,69 Milliar. Dengan kata lain bahwa Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat mampu mendorong pertumbuhan

yang ekonomi Kabupaten Nias Selatan.

Dari kedua variabel yang digunakan dalam model penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah adalah menjadi variabel yang cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Setiyawati (2007) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada sisi yang lain, hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan dengan hasil temuan Anwar (2016) yang menemukan bahwa PAD tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Manado, demikian juga dengan DAK yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Sebaliknya, DAU yang juga bagian dari dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado.

Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap perhadapan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan. Dengan menggunakan metode OLS, hasil estimasi model penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan adalah dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan. Dari kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, variabel PAD menjadi variabel yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan.

Melalui hasil penelitian ini maka dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan bahwa sangat dibutuhkan upaya peningkatan PAD Kabupaten Nias Selatan. Upaya ini selain untuk meningkatkan kemandirian

keuangan daerah, upaya peningkatan PAD ini pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Lukitasari, dkk. 2016. Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 (2), hal 218-232.
- Dewi, S. Laksmi. 2013. Pengaruh PAD, PMA dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, Vol. 2 (11), hal. 502-512.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4 (2), hal. 211-228.
- Todaro, Michael P. 1995. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Diterjemahkan oleh Haris A, Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.